

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH ATAS

PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

(Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang)

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh :

Dicky Moristiawan

1901120019

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DICKY MORISTIAWAN
Nomor Pokok : 1901120019
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Pengauditan
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR (Studi Kasus Pada Dinas
Perhubungan Kota Palembang)

Pembimbing Skripsi :

Tanggal 10-04-2023 Pembimbing I : Febransyah, S.E, M.M.

NIDN. 0203026601

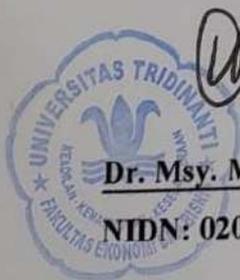
Tanggal 10-04-2023 Pembimbing II : Crystha Armereo, S.E, M.Si.

NIDN. 0226018601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ka. Prodi Akuntansi,



Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak.CA, CSRS

NIDN: 0205025401

Meti Zuliyana, S.E.,M.Si.Ak.CA.CSRS

NIDN: 0205056071



UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : DICKY MORISTIAWAN
Nomor Pokok : 1901120019
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Pengauditan
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR (Studi Kasus Pada Dinas
Perhubungan Kota Palembang)

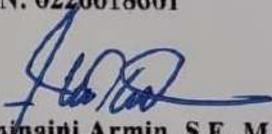
Penguji Skripsi :

Tanggal 10-04-2023 Ketua Penguji :  Febransyah, S.E, M.M.

NIDN. 0203026601

Tanggal 16-04-2023 Penguji I :  Crystha Armereo, S.E, M.Si.

NIDN. 0226018601

Tanggal 10-04-2023 Penguji II :  Kusminaini Armin, S.E, M.M.

NIDN. 0222086301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ka. Prodi Akuntansi,




Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak.CA, CSRS
NIDN: 0205025401


Meti Zuliyana, S.E., M.Si. Ak.CA. CSRS
NIDN: 0205056071

119/PS/DFE/23

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"La tahzan innallaha ma'ana"

Artinya: "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita".

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Allah SWT yang telah memberi kemudahan selama proses penyusunan skripsi
- Ibu dan Ayah yang selalu mendoakan setiap langkah yang kuambil
- Saudara-saudara kandungku tersayang
- Keluarga besar yang turut memberi dukungan moril dan materil
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Seluruh teman prodi Akuntansi angkatan 2019
- Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi strata-1 program studi akuntansi di Universitas Tridinanti Palembang.

Dalam proses pembuatan Skripsi ini penulis mengalami beberapa kesulitan dan hambatan, penulis juga menyadari dalam menyusun Skripsi masih terdapat banyak kekurangan. Tetapi penulis akan terus berusaha memperbaikinya dan berharap dikemudian hari akan mencapai hasil yang maksimal.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini :

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P Selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE.,M.Si.,Ak.,CA,CSRS Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana S.E., M.Si., Ak.CA, CSRS Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.
4. Bapak Febransyah, S.E, M.M.Selaku Pembimbing I.
5. Ibu Crystha Armereo, S.E, M.Si.Selaku Pembimbing II.
6. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Dinas Perhubungan Kota Palembang yang telah memberikan akses terbuka untuk melakukan penelitian.
8. Ibu dan Ayah yang selalu mendoakan dan memberi semangat penulis selama proses yang dilalui.
9. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat.
10. Teman-teman penulis diangkatan 2019 yang selalu bersama pada saat-saat berjuang dalam proses perkuliahan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis, dengan segala kerendahan hati, penulis banyak menyampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kebaikan yang diberikan.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan skripsi ini juga terbuka atas masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak untuk menjadi sempurna.

Palembang, April 2023

Penulis,

Dicky Moristiawan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dicky Moristiawan

NIM : 1901120019

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Prodi : Akuntansi/S1

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang)** dibuat dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan penjiplakan/plagiat terhadap karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya siap untuk menanggung segala konsekuensinya.

Palembang, 05 April 2023



Dicky Moristiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis.....	8
2.1.1 Sistem Pengendalian Internal	8
2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal	8
2.1.1.2 Prosedur dan Tujuan Sistem Pengendalian Internal.....	9
2.1.1.3 Komponen Sistem Pengendalian Internal.....	10

2.1.1.4 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal	11
2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	13
2.1.2.1 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	13
2.1.2.2 Unsur-unsur dalam SPIP	15
2.1.3 Retribusi	23
2.1.3.1 Retribusi Parkir	23
2.1.3.2 SOP Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Parkir ...	24
2.2 Penelitian Lain Yang Relevan	25
2.3 Kerangka Berfikir	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.1.1 Tempat Penelitian	31
3.1.2 Waktu Penelitian	31
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.1 Sumber Data	31
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	32
3.3 Populasi, Sampel, dan Sampling	33
3.3.1 Populasi	33
3.3.2 Sampel	33
3.3.3 Teknik Sampling	33
3.4 Rancangan Penelitian	34
3.5 Variabel dan Definisi Operasional	34
3.6 Instrumen Penelitian	35

3.7 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Palembang	39
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang	41
4.1.3 Tugas Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang	42
4.2 Pembahasan	56
4.2.1 Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel :

2.1	Penelitian Lain Yang Relevan	27
-----	------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar :	
2.1 Skema Kerangka Berpikir.....	30

ABSTRAK

Dicky Moristiawan, Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Atas Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang). Dibawah bimbingan Bapak Febransyah S.E., M.M dan Ibu Crystha Armereo, S.E, M.Si.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Internal Atas Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar, penerapan SPIP atas Pemungutan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palembang telah memenuhi kategori “baik”. Akan tetapi terdapat 3 unsur yang masih belum memenuhi kategori baik, hal tersebut diantaranya yaitu : (1) Pengendalian Risiko, belum terselenggaranya pengendalian risiko secara rutin yang ditandai dengan belum tersusunnya rencana pengendalian terhadap penyimpangan penerimaan; (2) Kegiatan Pengendalian, lemahnya kegiatan pengendalian ditunjukkan dengan kurangnya pengawasan terhadap juru parkir yang memungut retribusi parkir; (3) Pemantauan Pengendalian Intern, belum adanya prosedur yang jelas atas pengawasan terhadap juru parkir dan kolektor yang berakibat pada realisasi penerimaan retribusi parkir belum mencapai target.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Retribusi Parkir

ABSTRACT

Dicky Moristiawan, Government Internal Control System Analysis of Parking Retribution Collection Procedures (Case Study at the Palembang City Transportation Service). Under the guidance of Mr. Febransyah S.E., M.M and Mrs. Crystha Armereo, S.E, M.Sc.

The purpose of this research is to find out how the Internal Control System for Parking Retribution Procedures is (Case Study at the Palembang City Transportation Service). The data sources in this study were primary data, namely interviews and secondary data in the form of documents related to the application of the Government Internal Control System (SPIP) at the Palembang City Transportation Service. The data analysis technique in this study is a qualitative descriptive analysis.

The results of the study show that in general, the implementation of the SPIP for the collection of parking fees at the Palembang City Transportation Service has met the "good" category. However, there are 3 elements that still do not meet the good category, these include: (1) Risk Control, the absence of routine risk control as indicated by the lack of a control plan for revenue irregularities; (2) Control Activities, weak control activities are indicated by a lack of supervision of parking attendants who collect parking fees; (3) Internal Control Monitoring, there is no clear procedure for supervising parking attendants and collectors which results in the realization that parking retribution receipts have not reached the target.

Keywords: Internal Control System, Parking Retribution

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dicky Moristiawan, lahir di Sungai Penuh Kerinci pada 07 Juni 1999. Merupakan anak terakhir dari empat bersaudara dan anak laki-laki satu satunya. Bersekolah di SMAN 01 Bayang Utara Asam Kumbang, dan melanjutkan pendidikan di Universitas Tridianti Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi pada tahun 2019 sampai sekarang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern di lingkup instansi pemerintah diketahui menjadi suatu sistem yang diterapkan sebagai upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan Negara dapat dilaporkan secara andal, aset negara dapat dikelola dengan aman, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern dalam penerapannya harus senantiasa memperhatikan norma keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

PP No. 60 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun tujuan dari adanya pengendalian intern menurut Mulyadi (2015:163) :

- (1) Menjaga kekayaan organisasi/mengamankan asset ;
- (2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi ;
- (3) Mendorong efisiensi ;
- (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut diatas, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan telah diselenggarakan sesuai dengan rencana agar dapat mencapai tujuan, sistem ini yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ketentuan mengenai penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati atau walikota. Hal tersebut diperkuat dengan keluarnya Permendagri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga digunakan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan (*Fraud*). Dalam hal ini setiap organisasi pemerintah harus menerapkan SPIP untuk mencegah terjadinya kecurangan. Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam organisasi (Wiratna, 2015: 69). SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam UU No. 60 tahun 2008 terdiri atas unsur :

- (a) lingkungan pengendalian ;
- (b) penilaian risiko ;
- (c) kegiatan pengendalian ;
- (d) informasi dan komunikasi ; dan

(e) pemantauan pengendalian intern.

Jika didalam birokrasi pemerintahan terdapat sistem pengendalian internal yang lemah, maka dapat menjadikan peluang bagi pejabat maupun staf pada instansi pemerintah untuk melakukan kecurangan dikarenakan tindakan yang dilakukan dideteksi oleh orang lain. Sebaliknya, jika semakin baik sistem pengendalian internal dalam sistem birokrasi pemerintah, maka tindakan kecurangan akan sulit dilakukan, karena setiap kegiatan yang dilakukan telah dibatasi dan diawasi oleh tata kelola sistem pengendalian internal. Jadi, semakin efektif tingkat pengendalian internal dalam suatu sistem birokrasi pemerintah, maka akan semakin kecil pula kesempatan bagi pegawai untuk melakukan *fraud*.

Kasus *fraud* seperti suap termasuk dalam pemerasan ekonomi. Isu korupsi di Indonesia merupakan salah satu masalah utama negara karena penipuan seperti suap semakin sering terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 677 kasus korupsi antara tahun 2016 hingga pertengahan 2021, kasus itu terjadi di berbagai institusi pemerintahan. Tindak pidana korupsi terbanyak terjadi pada 312 kasus di pemerintahan kabupaten dan kota, disusul oleh 180 kementerian dan 82 pemerintah provinsi. Di sisi lain, ada 66 kasus korupsi di BUMN/BUMD. Selanjutnya, jika dilihat dari jumlah tindak pidana korupsi di DPR dan DPRD, ada lebih dari 35 kasus dan lebih dari 2 kasus di KPK. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kecenderungan korupsi ada di pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah terus meningkat (Firmansyah, 2021).

5 unsur sistem pengendalian intern pemerintah di beberapa SKPD Kota Palembang, telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tahun ini tentang sistem kontrol. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi dan ditingkatkan guna menciptakan sistem pengendalian intern yang lebih efektif terlibat sistem pembayaran tunai di instansi tersebut (BPK, 2018).

Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kota Palembang yang menerapkan SPIP untuk mencapai tujuannya. Dinas Perhubungan Kota Palembang juga menjadi salah satu SKPD yang memiliki prospek baik dalam menghasilkan retribusi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal pemungutan retribusi parkir, terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan tugas tersebut diantaranya adalah terdapat beberapa petugas parkir yang tidak resmi dan tidak memiliki tanda pengenal yang jelas dan sah, pungutan parkir liar, waktu-waktu pemungutan retribusi parkir yang tidak jelas, dan bila ditinjau dari sisi ilmu akuntansi kita mengetahui bahwa sekarang ini pemungutan parkir yang ada di jalan (yang bukan dipusat perbelanjaan modern ataupun tempat sejenisnya), serta tidak memberikan bukti transaksi berupa karcis parkir kepada pengguna jasa. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Kendala lain yang dihadapi dalam penerapan SPIP di lingkungan pemerintahan pernah diungkap dalam beberapa penelitian sebelumnya seperti yang diungkapkan oleh Zumriyatun (2015) yang menjelaskan bahwa tanggung jawab

penyelenggaraan SPIP dan keberhasilan penerapan SPIP di daerah sangat tergantung pada komitmen dari Kepala Daerah masing-masing. Sementara itu Miryam (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kelemahan SPIP diantaranya adalah kurangnya motivasi, kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang berkaitan dengan tugas, kolusi, ketidak pahaman tentang SPIP, kompetensi pegawai, struktur organisasi, dukungan informasi teknologi, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan latar belakang, fenomena penelitian dan riset terdahulu yang telah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Atas Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang) ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Internal atas Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang).

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua jenis manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta juga diharapkan sebagai referensi, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan kurikulum akuntansi yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Peneliti berharap dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu telah diperoleh selama masa perkuliahan dan menambah pengalaman baru mengenai masalah yang diteliti.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, alat pembandingan, dan evaluasi bagi instansi pemerintahan khususnya pada Dinas Perhubungan Kota Palembang dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan dan memutuskan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.

c. Bagi Civitas Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan serta menjadi bahan referensi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dengan menambahkan variabel lain yang belum dilakukan oleh peneliti lainnya khususnya dalam bidang akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, 2016. *Analisis Pengendalian Intern Atas Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Gowa.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Damas Dwi Anggoro, S. M. (2018). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: erlangga.
- Damayanti, I. (2020). *Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang)*. KRISNA: *Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 95-102.
- Himmah, Virasty Fitri Faiqotul. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus Di Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo)*. Diss. Universitas Brawijaya, 2015.
- Kaligis, G. M. (2015). *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Mahua, Z. A. (2021). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Medan*. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).

- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi. 2014. *Auditing*, Edisi 6, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuryaman dan Christina Veronica. (2015). *Metode Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktik*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, dan Nunung Ayu Sofiati. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.